



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

NASRIL AKBAR LUBIS

NIM : 11627103842

PROGRAM S 1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1441 H/ 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru"* yang ditulis oleh:

Nama : NASRIL AKBAR LUBIS
 NIM : 11627103842
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Syawal 1441 H
 16 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi

Lysa Anggrayni, SH., MH
 NIP.197901312006042003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA PEKANBARU

Nama Panulis : NASRIL AKBAR LUBIS
NIM : 11627103842
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. H. Mhd. Kastulani, SH., MH
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Muslim, S.Ag., M.Hum
(Anggota Penguji)
4. Hellen Last Fitriani, SH., MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nasril Akbar Lubis, (2020) : “Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara dan setiap orang demi kehormatan serta Pelaksanaan dan martabat Manusia ,untuk itu seorang Narapidana tetap memiliki hak walaupun mereka berada di dalam penjara hak narapidana tersebut salah satunya ialah hak mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak yang di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala lembaga pemasyarakatan perempuan pekanbaru, Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan dan Pemasyarakatan, Petugas Sipir dan Tenaga Medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru serta penyebaran angket kepada Narapidana. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan peraturan yang ada belum terlaksana dengan baik karena masih banyak hak-hak Narapidana yang tidak terlaksana seperti pengecekan massal rutin sebulan sekali, hak mendapatkan alat mandi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembalut, hak mendapatkan makanan tambahan untuk narapidana menyusui hamil dan berpuasa, serta tidak terdapat dokter umum dan dokter gigi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana adalah sumber daya manusia yang belum memadai dalam jumlah tenaga medis, kapasitas lapas yang melebihi batas ideal standar lapas, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kamar dan kelengkapan poliklinik, serta kurangnya kesadaran narapidana dalam menjaga kebersihan diri agar terhindar dari sumber penyakit yang dapat menular kepada narapidana lainnya yang mengakibatkan narapidana cenderung mengalami penyakit selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.....

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”**.

Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Mukhsin Lubis dan Eti Sumiati serta ke-tiga saudara penulis Bripda Nasrul Akbar Lubis, Ismi Aziz Lubis, Ali Abdullah Lubis, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
9. Sahabat Penulis Rara Mulyani, Azhari Rizaldi, M.Fatchulil Zaeni, M.Faiz Azzaki, Sariman Damanik, Azizul, yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memperoleh manfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya

Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.....

Pekanbaru, 7 Mei 2020

Penulis,

NASRIL AKBAR LUBIS

Nim : 11627103842

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	19
B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	20
C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	20
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Pegawai Sub Bagian.....	23
E. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	30
F. Status Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	31
G. Status Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hak Asasi Manusia	36
B. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan Indonesia	41
C. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	51
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	13
Tabel II.1	Jenis Kelamin Pegawai.....	31
Tabel II.2	Jenis Agama Pegawai	32
Tabel II.3	Jumlah Penghuni Lapas	33
Tabel II.4	Jumlah Status Tahanan	33
Tabel II.5	Jenis Masa Narapidana	34
Tabel II.6	Jenis Perkara / Kasus	34
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Obat-Obatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	57
Table IV.2	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengecekan Kesehatan Massal Secara Rutin Yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	60
Table IV.3	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pemberian Alat Mandi Setiap Bulan Yang Ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	62
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Pemberian Pembalut Setiap Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	63
Tabel IV.5	Daftar Menu Makanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	69
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Terhadap Menu Makanan Yang Diberikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Warga Negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat terutama terpidana sendiri agar menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹ Penjatuhan sanksi pidana yang diterima dijalani oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Hak untuk bergerak seseorang di cabut dalam

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang di tentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih berupa tahanan, orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, Narapidana juga merupakan manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar Norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh Negara untuk menjalani hukuman³. Namun dalam menjalankan hidup Narapidana tidak sepenuhnya kehilangan kemerdekaan, walaupun batas gerakanya di batasi dalam satu lingkungan namun hak-hak Narapidana harus tetap di junjung tinggi, hak-hak Narapidana salah satunya yang di tuangkan dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Hak Kesehatan dan Makanan yang Layak.

Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 59 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud . Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya⁴

Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktifitas–aktifitas *profesional* di bidang pelayanan kesehatan bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan kesehatan, dasar mengenai pemberian hak kepada Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah bahwa penjatuhan pidana penjara hanya di batasi dalam kebebasan fisik mereka saja dan bukan mengenai hak kesehatan⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara dan setiap orang demi kehormatan serta Pelaksanaan dan martabat Manusia.⁶ Perbuatan melawan hukum tidak boleh di lakukan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang di lindungi oleh Negara dan di miliki setiap orang di atur dalam ketentuan hukum. Hak Asasi Manusia dengan Negara hukum tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dengan ide

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵ Pitri Wili Ramadani, ”Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan)

Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hal 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud dengan demikian pengakuan dan pengukuhan Negara hukum salah satunya melindungi Hak Asasi Manusia agar kebebasan perseorangan dapat diakui dihormati dan dijunjung tinggi.⁷

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan nya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya (Pasal 25 ayat 1 DUHAM). Narapidana wanita sebagai Manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 Ayat (1) DUHAM tersebut.⁸

Hal ini tentu saja terbagi dalam beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya karena kesadaran masyarakat yang kurang akan kesehatan dan dapat juga terjadi karena kelalaian petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi dan memberi pelayanan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok membina Narapidana tanpa bantuan orang lain.

⁷ Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, (Malang: Ghalia Indonesia, 1993), hal, 27.

⁸ Angreini Kresnadari “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)” Vol.6 No.2, Februari 2018, hal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petugas Lembaga kemasyarakatan tetap harus bekerja sebagai pembina Narapidana, petugas membina Narapidana bukan hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa sebagai pembina, sangat keliru jika seseorang ingin menjadi petugas Lembaga kemasyarakatan hanya karena tidak diterima bekerja ditempat lain atau hanya karena ingin menjadi Pegawai Negeri, jika petugas Lembaga kemasyarakatan bukan sebagai panggilan jiwa, mereka yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan tidak sepenuh hati hanya akan menjadi penghalang dalam membina Narapidana, petugas yang demikian tentu tidak memiliki dedikasi, terhadap pekerjaannya dan hanya akan menjadi duri dalam pembinaan Narapidana.⁹

Hak-hak Narapidana yang di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan Perawatan, baik Perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya

⁹ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*(Jakarta: Djambatan, 1995), ha, 173-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mendapatkan pembebasan bersyarat
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa salah satu hak yang harus dipenuhi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah terpenuhinya Hak kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana. Aturan lebih lanjut terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru pelayanan kesehatan menurut penulis belum begitu maksimal, berdasarkan observasi yang penulis dapatkan masih terdapat beberapa Pasal dari Peraturan Pemerintah no 32 tersebut yang belum terlaksana seperti : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana.

“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan tidur dan mandi”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melarang Narapidana untuk membawa uang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun yang terjadi di lapangan masih banyak Narapidana yang membawa uang *cash* ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak dibenarkan narapidana membawa uang ke dalam lembaga Pemasyarakatan hal ini dijamin dengan adanya pemberian perlengkapan Narapidana seperti perlengkapan mandi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan sebulan sekali oleh Pemerintah sebagai hak Narapidana, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru pemberian alat mandi setiap bulannya tidak terlaksana. Narapidana Perempuan yang memiliki siklus khusus yang berbeda dari laki-laki seperti menstruasi sehingga Narapidana Perempuan membutuhkan pembalut setiap bulan nya, hal ini akan menjadi masalah bagi Narapidana dalam urusan kesehatan alat reproduksi karena tidak berjalannya hak pemberian alat mandi dan perlengkapan lain nya, Narapidana harus membeli sendiri pembalut tersebut setiap bulan. Tidak semua Narapidana memiliki uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan, banyak Narapidana yang tidak memegang uang dan hanya mengharapkan bantuan dari teman sekamarnya dalam hal pembalut tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap kesehatan organ reproduksi menimbulkan banyak penyakit yang akan di rasakan oleh narapidana seperti keputihan dan lain sebagainya, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana

“Pada setiap lapas di sediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan di sediakan sekurang kurangnya seorang Dokter dan seorang tenaga kesehatan”

Berdasarkan observasi yang penulis dapatkan di lapangan tenaga medis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hanya ada satu orang Perawat saja dan tidak memiliki Dokter tetap. Dokter yang dulunya bertugas sudah di mutasikan ke daerah lain yaitu ke Sumatra Barat sejak bulan Juli 2019 lalu, dan hingga kini belum ada Dokter pengganti sedangkan jumlah Narapidana yang menghuni pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas IIA dinilai sudah melebihi batas ideal atau *over load*, yang seharusnya kapasitas ideal warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA adalah 148 jiwa namun sekarang dihuni oleh 392 orang.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana.

“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”

Salah satu yang penting dalam menunjang kesehatan adalah asupan makanan bagi Narapidana, dalam hal makanan sering kali makanan yang disediakan tidak sesuai dengan jadwal menu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

Dalam menjalankan ibadah hak narapidana juga harus terpenuhi seperti ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan pada Narapidana “setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan”.

Dalam observasi di lapangan yang penulis temukan hal ini masih kurang terlaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru penambahan makanan untuk Narapidana yang menjalankan puasa Senin-Kamis, persiapan makanan untuk buka puasa di bawa oleh keluarga yang bersangkutan sehingga petugas tidak menyediakan makanan tambahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dari penelitian ini hanya membahas pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang di harapkan penulis secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapida.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis,pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.
3. Bagi Instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru yang terletak di jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) Hal 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Pembinaan Rehabilitasi dan Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Tenaga medis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan kesehatan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Random Sampling*. Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 456 orang, yang terdiri dari 66 orang Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang ditetapkan menggunakan teknik *Purposive Sampling* diantaranya ialah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan dan Pemasarakatan, Petugas Sipir dan Tenaga Medis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dan 392 orang Narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang ditetapkan dengan teknik *Random Sampling*. Populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Responden	Sampel	Persentase Sampel	Metode Sampel
1	Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	66	3	2.5%	Purposive Sampling
2	Narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	392	40	10%	Random Sampling

Sumber : Data Olahan 2020

5. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti¹¹. Pada penelitian ini data primer penulis yang penulis dapat berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan pemenuhan hak

¹¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, adapun yang penulis wawancarai adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Pembinaan rehabilitasi dan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sipir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, tenaga medis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil karya ilmiah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu juga dapat dipergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsny.

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang dengan objek penelitian, hasil penelitian data bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan¹².

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan lain sebagainya.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
- b. Wawancara, ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada pihak yang berkaitan.

¹² *Ibid.*, hal. 22.

¹³ *Ibid.*, hal. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket yaitu penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditetapkan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.
- d. Studi kepustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini. ¹⁴

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan di simpulkan dalam bentuk analisa.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

- a. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 32-36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, visi misi , struktur organisasi jumlah tahanan beserta kasus yang ada..

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Hak Asasi Manusia, Tinjauan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari, pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan

Yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

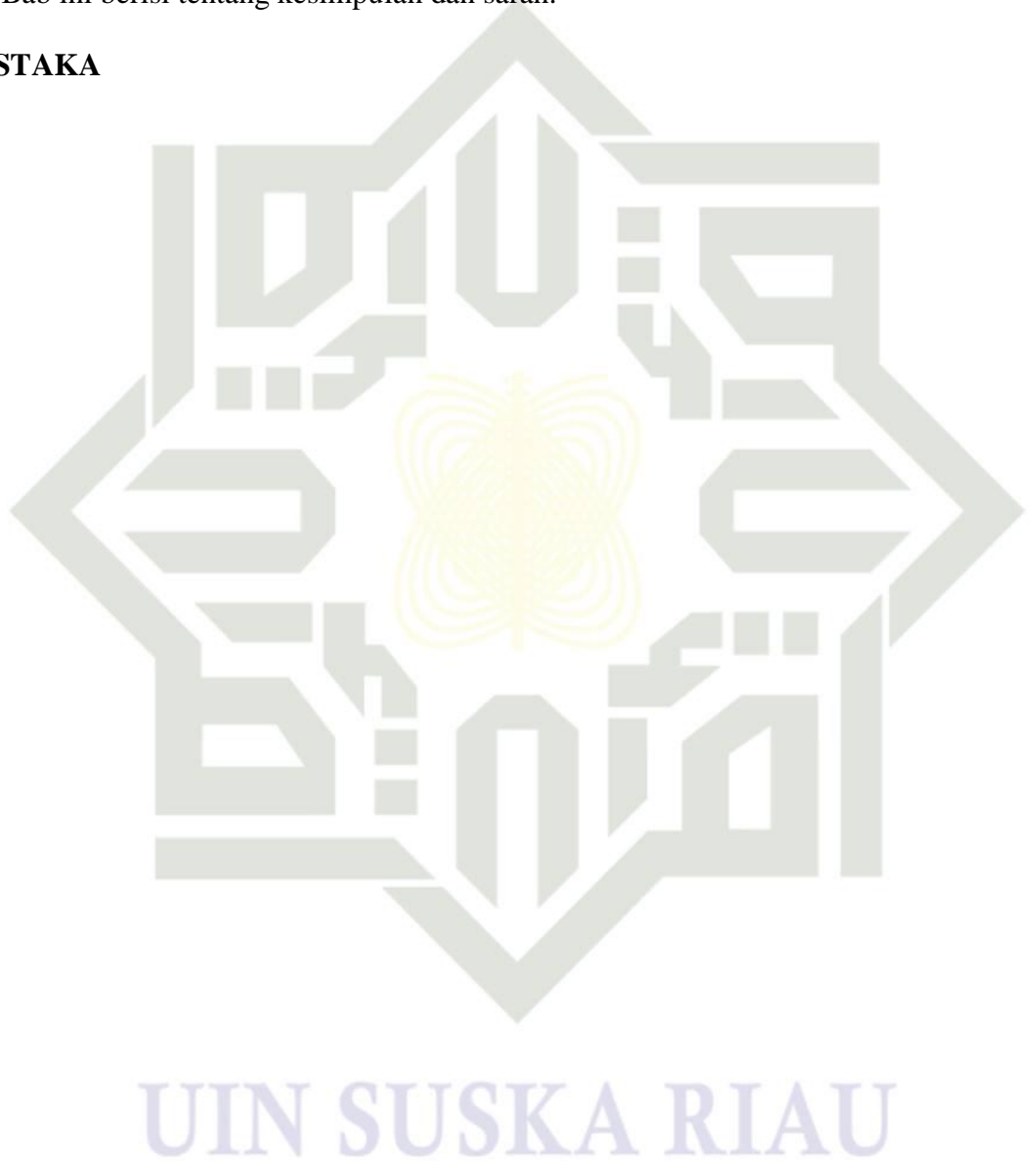
BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Pekanbaru, Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak di jalan Samratulangi, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan jalan Achmad Yani dan jalan Juanda, dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2020 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Miliar dalam bentuk hibah.¹⁵

¹⁵<https://docplayer.info/47735371-Lembaga-pemasyarakatan-klas-ii-a-pekanbaru-lapas>, akses pada tanggal 24/02/2020. Pkl. 21.03 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

1. Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan *profesional* dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

2. Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia
2. Membangun kelembagaan yang *profesional* dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan *stakeholder*.¹⁶

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

a. Tugas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari

¹⁶*Ibid*, hal 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

b. Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melakukan fungsi untuk :

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
5. Melakukan urusan ketata usaha dan rumah tangga

c. Motto

Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah “BERSAMA” (Bersih, Sehat, Aman, Mandiri, Aktif dan produktif).

Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020

1. Berkomitmen mendorong 681 staker pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK / WBBM.
2. Pemberian hak remisi sebanyak 288.530
3. Pemberian program integrasi berupa PB,CB,CMB,dan asimilasi kepada 69.358 narapidana
4. Pemberian rehabilitasi medis dan social kepada 21.540 narapidana pengguna narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemberian makanan siap saji pada UPT pemasyarakatan tanggerang dan nusa kambangan.
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh lapas/rutan
7. Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana
8. Mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 ha
9. Mewujudkan *zero overstaying* tahanan
10. Mewujudkan penyelesaian *overcrowding* di lapas/rutan
11. Meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak sebesar 7.000.000.000.00
12. Pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan pada tiap wilayah
13. Menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA
14. Mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 rupbasan
15. Menghantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan pada NKRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Enam Butir Atensi Presiden Terhadap Pemasyarakatan

1. Penanganan *over* kapasitas
2. Penanganan *over staying*
3. Meningkatkan koordinasi pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun luar
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kamtib dari luar maupun dari dalam
5. Meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di lapas / atau rutan dan keterlibatan pegawai dalam peredaran narkoba
6. Meningkatkan kerjasama dengan para *stakeholder* dalam rangka meningkatkan keterampilan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Pegawai Sub Bagian

1. Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi

- a. Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP
- d. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas II A Pekanbaru
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas II A
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- h. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas II A Pekanbaru
- i. Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahan tangga, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha
- b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor.
- d. Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan.
- f. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

3. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik
Lembaga Pemasyarakatan
- b. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan bimbingan pegawai bawahan
- d. Melaksanakan ketatausahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- f. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP/ Tim Pengamat Pemasyarakatan dan memimpin jalannya sidang
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas

4. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Napi/Anak Didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak Didik
- c. Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi
- d. Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak Didik
- e. Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Napi/ Anak Didik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan
- g. Mengkoordinasikan ketatausahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat)
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang teknis Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja

5. Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- b. Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan
- c. Melakukan pengawasan melekat (Waskat) dan melaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- d. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

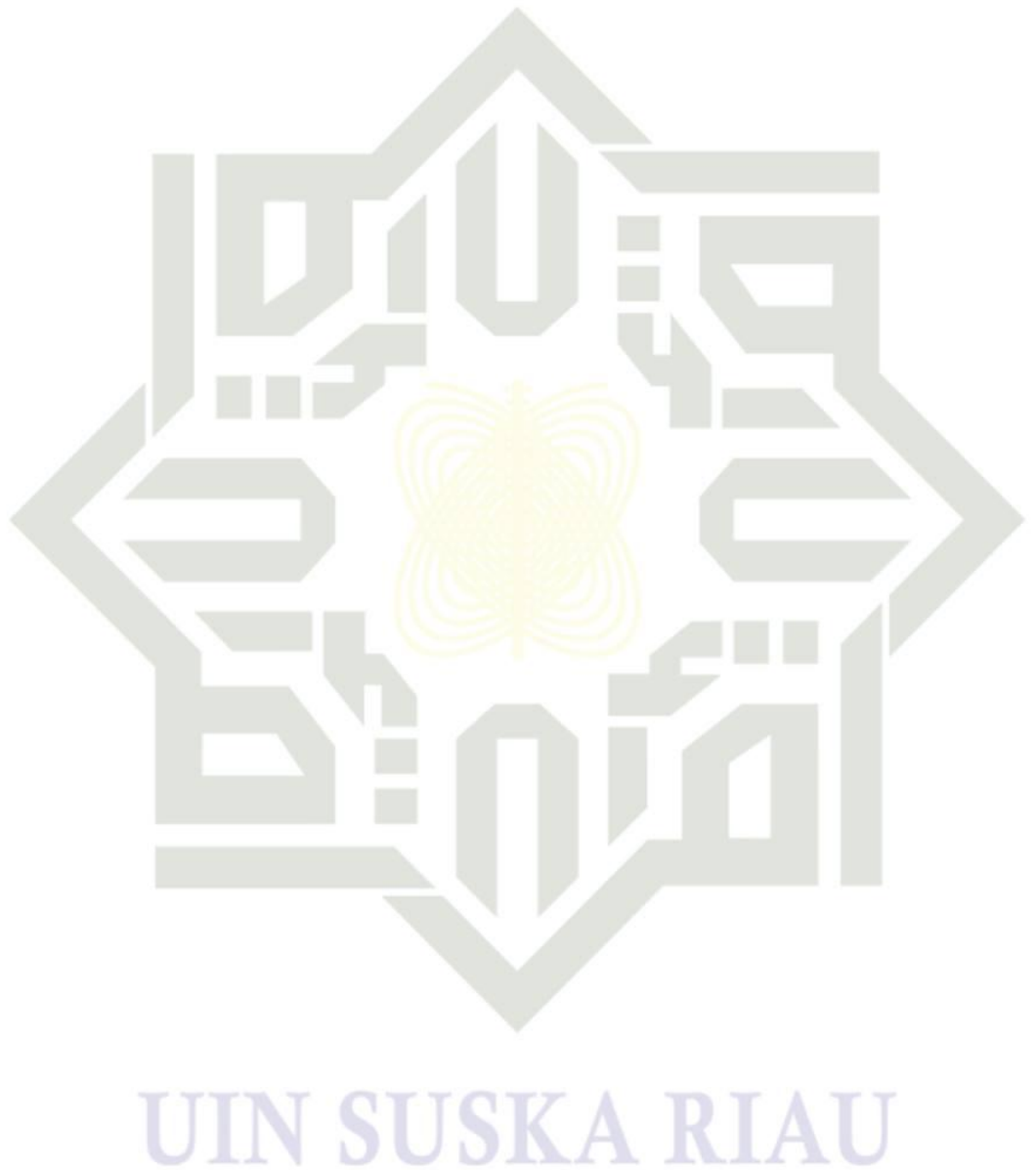
- e. Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penggeledahan kamar hunian secara acak dan insidentil dengan seksi yang lain
- g. Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

6. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kplp)

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, dengan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi /Anak Didik
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan

- h. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan
- i. Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

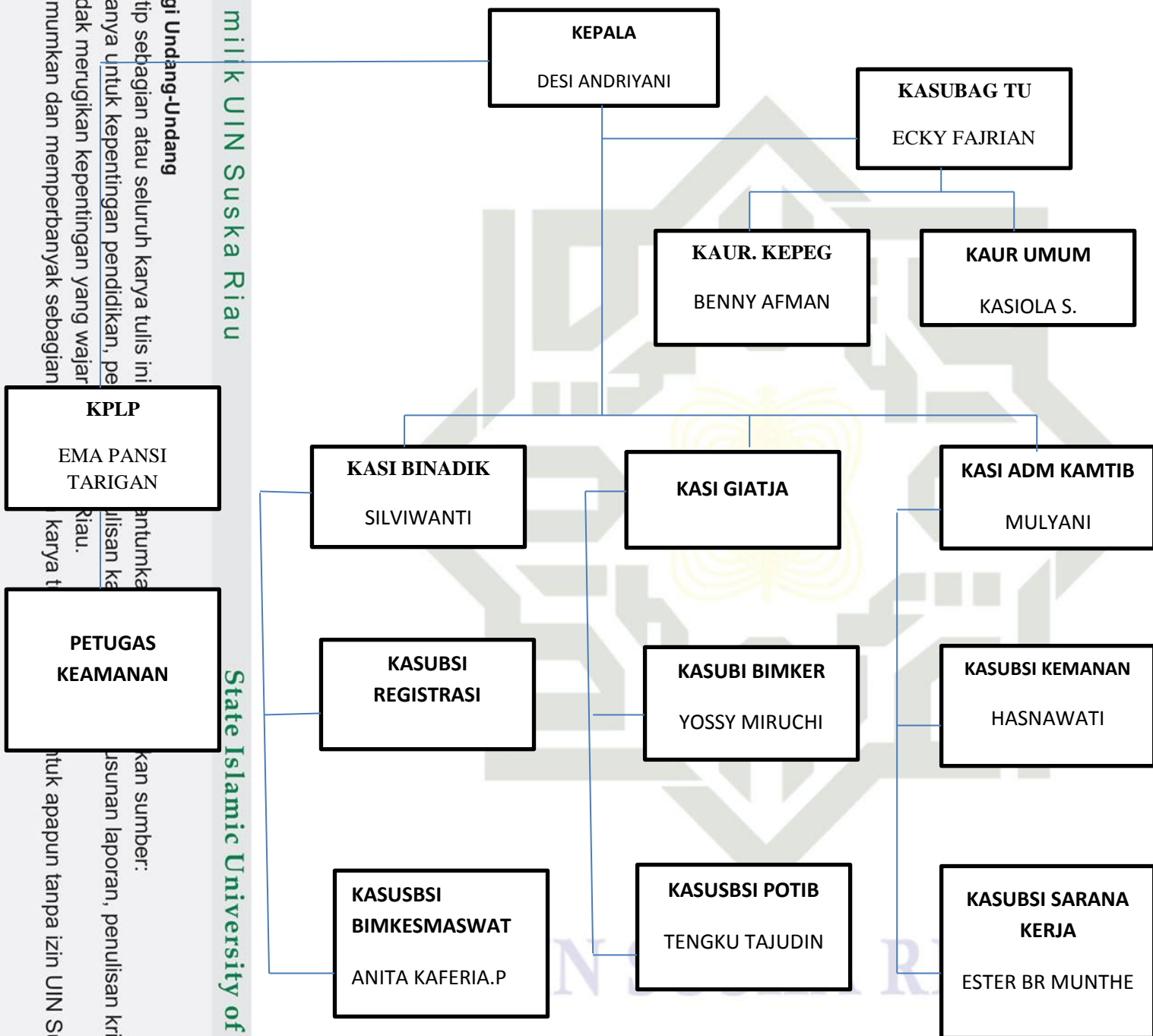


¹⁷ *Ibid.* hal 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Status Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dioperasikan oleh para petugas yang bertugas pada masing-masing sub bagian Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis telah mengelompokkan petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru antara lain berdasarkan jenis kelamin, agama dan golongan.

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Table II.1

Jenis kelamin pegawai

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki laki	14 orang
2	Perempuan	52 orang
Total		66 orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan jumlah 14 orang petugas laki-laki dan 52 orang petugas perempuan sehingga petugas pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA tersebut didominasi oleh petugas perempuan hal ini juga bertujuan agar pelayanan pada narapidana perempuan dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah pegawai berdasarkan agama

Table II.2

Jenis Agama Pegawai

No	Agama	Jumlah
1	Islam	50 orang
2	Kristen	16 orang
3	Budha	-
4	Hindu	-
Total		66 orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hanya terdapat dua jenis kepercayaan yang di anut oleh petugas yaitu agama islam dan kristen dimana petugas dengan agama islam lebih dominan atau lebih banyak di bandingkan dengan petugas yang memeluk agama Kristen dengan jumlah petugas yang beragama islam berjumlah 50 orang dan yang beragama Kristen berjumlah 16 orang.

Status Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis telah mengelompokkan data Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan jumlah tahanan, lamanya masa tahanan , jenis kasus. Yang dapat di lihat pada table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Tabel II.3

Jenis Penghuni Lapas

No	Status	Jumlah
1	Tahanan	72 Tahanan
2	Narapidana	316 Narapidana
3	Anak Narapidana	3 Bayi
Total Penghuni		391 Penghuni

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

2. Data Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru

Tabel II.4

Jumlah Status Tahanan

NO	TAHANAN	JUMLAH
1	AI (Titipan Kepolisian)	15
2	AII (Titipan Kejaksaan)	14
3	AIII (Tahanan PN)	30
4	AIV (Tahanan PTN)	13
5	AV (Tahanan MA)	-
TOTAL		72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

3. Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru

Tabel II.5

Jenis Masa Tahanan Narapidana

No	Narapidana	Jumlah
1	HUKUMAN MATI (mati)	01
2	SEUMUR HIDUP (Hukuman Seumur Hidup)	04
3	BI (Hukuman Di Atas 1 Tahun)	305
4	BIIa (Hukuman Antara 3 Bulan – Satu Tahun)	4
5	BIIb (hukuman di bawah 3 bulan)	-
6	BIII (menjalankan subside)	2
TOTAL		316

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

4. Jenis perkara yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Pekanbaru

Tabel II.6

Jenis Perkara / Kasus

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Narkotika	301
2	Illegal logging	-
3	Korupsi	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Trafficking	-
5	Perjudian	02
6	Penipuan	10
7	Terorisme	
8	Lain lain	60
Total		388

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tahanan berjumlah 72 dan Narapidana berjumlah 316 dan total penghuni lapas yaitu 391 ditambah dengan anak dari Narapidana yang dirawat bersama ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan hingga mencapai usia 2 tahun. Berjumlah 3 orang anak / bayi. Menurut hasil tersebut jumlah penghuni lapas sudah melewati batas ideal kapasitas yang idealnya berjumlah 149 orang pada lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Jumlah residen yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berjumlah 30 orang, sedangkan kasus yang paling banyak yaitu kasus narkoba yang berjumlah 301 orang disusul dengan urutan kedua yaitu kasus penipuan dan lain sebagainya, dengan ini kasus narkoba yang menjadi dominan dari kasus yang dialami oleh masyarakat Pekanbaru berdasarkan data dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ini jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001. Sebelum amandemen ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas, tetapi secara implisit disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka..¹⁸ salah satu ciri negara hukum adalah bahwa negara hukum itu mengatur tentang Hak asasi manusia.

Schelteema mengungkapkan ciri khas Negara hukum bahwa Negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda, Negara hukum adalah pengertian yang berkembang sebagai reaksi masa lampau karena itu unsur Negara hukum terletak pada sejarah suatu Negara. Pemberian makna dan isi Negara hukum Indonesia dikemukakan oleh Wahjono, ialah negara yang berdasarkan atas hukum dengan rumusan *rechtsstaat* dengan anggapan bahwa pola yang di ambil tidak menyimpang dari negara hukum pada umumnya disesuaikan dengan keadilan Indonesia artinya harus disesuaikan dengan pandangan hidup dan pandangan Negara.

Pengertian yang mendasar dari Negara hukum dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, atau negara

¹⁸Lisa Angrayni, *HUKUM & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), hal.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menepatakan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁹

Atas dasar inilah nilai-nilai universalitas HAM dinormakan dalam hukum dasar Negara (Konstitusi) dalam tatanan bernegara, yang kemudian secara hierarki diturunkan pula penormaannya pada peraturan perUndang-Undangan²⁰

Berdasarkan uraian di atas telah menjadi dasar teori pengawasan yakni pemerintah harus berdasarkan atas asas sistem konstitusi dan asas persamaan di depan hukum. Agar tercipta tegaknya hukum dan tercapainya tujuan hukum , dengan demikian sistem konstitusi menciptakan tertip hukum dan memberikan jaminan adanya persamaan didepan hukum tersebut, sepertihalnya Indonesia yang menjadikan UUD 1945 sebagai konsitusi yang mengatur agar terjaminnya hak dan persamaan di depan hukum bagi Warga Negeranya.

Tersirat dalam alinia kedua pembukaan UUD 1945 yaitu “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka , bersatu , berdaulat , adil dan makmur” pada alinea ke tiga diakui adanya “ kehidupan kebangsaan yang bebas “ kemudian pada alinea ke empat “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa , ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹⁹La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makasar : SIGn,2009).hal.45-46.

²⁰Lisa Angrayni, *HUKUM & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Kalimedia,2016),hal.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” . semua itu merupakan dasar bahwa Indonesia merupakan Negara hukum dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²¹

Sedangkan pengertian ham dapat dikemukakan oleh beberapa ahli, Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah “hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia²²

Adnan Buyung Nasution mengatakan HAM adalah hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat di lenyapkan dari manusia, hak ini adalah hak yang melekat pada Manusia yang telah di peroleh dan di bawanya bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di kehidupan masyarakat.

Adapun Desire Frans menyatakan HAM adalah hak yang di peroleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal , hak dalam kategori ini di sebut “*mensenrechten*” adapun hak lain di peroleh seseorang karena menjadi warga negara dari suatu negara yang di sebut sebagai hak dasar.

Menurut Franz Magniz Suseno hak asasi manusia ialah hak yang di miliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

²¹La Ode Husen,*op.cit*, hal.47-49.

²² Lariva evaazalia ,”Pemenuhan Kah Khusus Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru”, Volume 2 ,Nomor 2,10 Oktober 2015 ,hal 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Louis Hanken HAM adalah tuntutan tuntutan yang dipertahankan yang dikenal sebagai hak bukan tuntutan-tuntutan atas cinta kasih orang tidak harus mendapatannya atau menerimanya , tuntutan itu bukan bersifat moral namun merupakan tuntutan hukum yang dapat di tegakkan berdasarkan hukum tertentu.

Menurut Soetadyo Wignjosoebroto HAM adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin din alihkan kepada orang lain apalagi dirampas oleh siapapun termasuk kekuasaan negara sekalipun .²³

Hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara dan juga hak politik warga memiliki kedudukan sama dalam pandangan Negara, tidak ada diskriminasi dan sebagainya dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun subyek hukum. Secara rinci hak-hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.
Hak ini wajib dilindungi oleh hukum tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan hukuman yang keji tidak manusiawi atau merendahkan martabat,pada khususnya

²³ Muhammad Asri, Hak Asasi Manusia Filosofi Teori & Instrumen Dasar,(Makasar : Syarif Kasim Riau, 2018), Hal 12-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

3. Tidak seorangpun dapat diperbudak,perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk harus dilarang.
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam wilayah tersebut.
6. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum dan peradilan.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir erkata keyakinan dan beragama.
8. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.
9. Dilarang adanya setiap bentuk diskriminasi.²⁴

Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakkan hukum HAM. Selain itu beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.²⁵

Dalam UUD 1945 perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia khususnya mengenai pengaturan HAM dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000. perubahan dan

²⁴Lisa Angrayni,*op.cit*.hal.98-99.

²⁵*Ibid.*,hal.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri yaitu BAB XA Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.²⁶

B. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana²⁷, narapidana sebagai manusia bersalah tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, walaupun hak kemerdekaannya di ambil negara, hanya saja sebagian hak narapidana tersebut dibatasi sesuai dengan ketentuan Negara yang berlaku.

Adapun hak yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

²⁶*Ibid*, hal.75.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 9 Juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸

dengan demikian pembinaan terhadap narapidna memiliki landasan konstitusi dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memberikan pelayanan dan pembinaan narapidna melalui tatanan sistem pemasyarakatan.

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan doktor suharjo, untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan itu bukan saja tempat untuk semata-mata untuk memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang terpidana agar mereka dapat menyesuaikan diri kembali pada lingkungan masyarakat sebagai manusia yang taat hukum.²⁹

Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Dalam Pasal 1 ayat

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14.

²⁹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014) Hal, 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁰

1. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga.³¹

2. Proses pembinaan narapidana dilakukan melalui empat tahap pembinaan:

- a. Tahap pertama dilakukan sampai 1/3 masa tahanan dengan keamanan yang *maximum*

³⁰Undang Undang Negara Indonesia Tahun 1945 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2) .

³¹Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), Hal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tahap ke dua di lakukan antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya, jika narapidana menunjukkan sifat tobat atau insyaf dan berubah maka di beri sedikit kebebasan, dengan pengamanan *medium*.
- c. Tahap ketiga dilaksanakan antara 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya ,proses ini di sebut asimilasi di mana narapidana diberi kebebasan bermasyarakat di luar tembok lapas atau bekerja dengan pihak ke tiga sampai dengan sore hari dan kembali lagi ke lapas.
- d. Tahap ke empat dilaksanakan pada 2/3 masa pidana nya sampai dengan bebas pada masa ini narapidana di berikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengamanan *minimum*³²

Sistem pemasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem pemasyarakatan diharapkan setelah menjalani proses pemidaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.³³

3. Pelaksanaan dalam pelayanan

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

³²*Ibid*, hal 11.

³³*Ibid*, hal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.³⁴

³⁴Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hal 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-Undnagan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

pada hakikatnya Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, tanpa mengabaikan segala hak-hak dasar sebagai seorang manusia . salah satu hak narapidana yang terdapat pada Pasal 14 point d : Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.³⁵ Adanya hak tersebut merupakan jaminan dari Negara terhadap pengakuan HAM yang ada di indonesia terhadap warga negaranya termasuk juga kepada warganegara yang berstatus narapidna. Segala bentuk kewajiban dan kegiatan pemasarakatan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yang disebut BAPAS, yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan , mengenai hak kesehatan dan makanan yang layak telah di atur pula pelaksanaan nya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pasal 14

1. Setiap narapidana dan anak didik kemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Pada setiap lapas di sediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas.

Pasal 16

1. Pemeriksaan di lakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
2. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasayarakatan ada keluhan mengenai kesehatan maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan
3. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditemukan penyakit menular maka penderita harus di rawat secara khusus.³⁶

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pelayanan kesehatan ditujukan kepada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Agar pelayanan kesehatan terwujud secara optimal, dalam pelaksanaannya diperlukan keterpaduan sistem pelayanan kesehatan :

1. Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Oleh karena itu, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu diatur penempatan tenaga kesehatan.
2. Unit Pelayanan Kesehatan Kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan. Walaupun terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang membantu pelayanan kesehatan terutama di Rutan/Lapas yang berada di daerah, tetapi kemandirian pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan tetap diperlukan khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan tertutup dan dengan birokrasi yang mengikutinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sehingga diperlukan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

4. Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama di Rutan/Lapas ada kalanya memerlukan sistem rujukan. Sistem rujukan dilakukan dalam hal pengiriman dan penerimaan pasien ke tempat rujukan. Sistem rujukan membutuhkan kerja sama yang resmi antara pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak lain seperti PT. ASKES. Puskesmas wilayah kerja, Dinas kesehatan, Pemerintah daerah setempat dan rumah sakit. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama yang resmi dengan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pelayanan kesehatan untuk mempermudah pelaksanaan sistem rujukan pasien.

5. Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan Obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Di Rutan/Lapas, perputaran warga binaan pemasyarakatan dari satu unit pelaksana teknis ke unit pelaksana teknis yang lain dan banyaknya jenis penyakit memerlukan perencanaan yang matang dalam menentukan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan serta pengadaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pendanaan Kesehatan Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan dan perputaran ke luar masuk Rutan/Lapas memerlukan pertimbangan tersendiri dalam pembiayaan kesehatan di Rutan/Lapas. Selain itu, pegawai Rutan/Lapas sebagai petugas di lapangan mempunyai risiko pekerjaan yang tinggi juga memerlukan penanganan dan pendanaan tersendiri. Peningkatan penyakit HIV/AIDS, TBC, paru serta peningkatan penyalahgunaan psikotropika terutama penggunaan dengan jarum suntik tidak sehat di masyarakat berdampak langsung pada tingginya angka kesakitan di Rutan/Lapas sebagai dampak peningkatan kriminalitas dan pelanggaran hukum. Meningkatnya berbagai macam penyakit tersebut selain membutuhkan penanganan kesehatan jangka panjang juga membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang cukup besar pula.³⁷

³⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 37/Per/Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menerangkan bahwsanya pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik, negara menjamin pelaksanaan kesehatan lapas yang dapat dilihat dari pedoman pelaksanaan yaitu Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pada setiap LAPAS di sediakan poliklinik dan fasilitasnya dan sekurang kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainna. Hal ini dilihat dari kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang tidak sebanding dengan tenaga medis yang hanya berjumlah 1 orang perawat, semestinya tersedia Dokter umum dan Dokter gigi. Ketersediaan ruangan dan fasilitas medis belum memadai seperti alat medis dan klinik perawatan yang sempit ,tidak terdapat ruangan Dokter gigi yang seharusnya wajib ada pada Lembaga Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan hak makanan yang layak juga belum sepenuhnya berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari tidak adanya pemberian makanan tambahan ketika narapidana berpuasa, seharusnya untuk narapidana yang berpuasa berhak mendapat makanan tambahan, begitu pula pada ibu hamil dan menyusui sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, hal ini belum terlaksana pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru dimana tidak terdapat perbedaan dan menambahkan menu pada wanita hamil dan menyusui.

Pemberian hak peralatan mandi dan pembalut yang seharusnya diperoleh secara gratis sebagai hak narapidana hal ini juga belum terlaksana, untuk memperoleh hal tersebut narapidana membeli di koperasi maupun diberikan oleh pihak keluarga yang mana dalam pedoman pelayanan tentu saja seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui kementerian hukum dan HAM untuk dapat memberikan penanganan yang optimal pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika negara telah berupaya menjamin hak-hak warga negaranya dengan mengeluarkan sejumlah tata tertib peraturan yang ada namun aparat penegak dan pelaksana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya tentu saja hal ini tidak akan membuahkan hasil,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya hak-hak yang telah di jamin oleh Negara tersebut senantiasa akan terabaikan.

Semestinya dalam sebuah lembaga pemasyarakatan ada pihak pengawas yang di sediakan untuk mengawasi jalannya hak-hak tersebut karena dalam masalah hak kesehatan pihak lembaga pemasyarakatan tidak memberi tahukan apa saja hak yang diperoleh narapidana sehingga masih banyak hak yang terabaikan, dalam keadaan seperti ini walaupun pelanggaran HAM tersebut bersifat kecil namun tanpa adanya tanggung jawab dalam menegakkan HAM oleh Negara tentu saja akan berdampak pada narapidana.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru di pengaruhi beerapa faktor :

- a. Faktor sumberdaya manusia yang belum memadai, minimnya tenaga medis yang tersedia sehingga tidak seimbang dengan banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA pekanbau. Belum tersedianya dokter tetap di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut , peran pemerintah dalam menyediakan aparatur negara dalam bidang tenaga medis semestinya ditanggapi dengan sigap karena menyangkut kepada hak kesehatan narapidana yang telah di jamin oleh negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dapat mempengaruhi belum tercapainya pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak secara baik dan optimal dikarenakan tidak terdapatnya kelinik yang memadai untuk menangani pasien dan kurangnya jumlah bangunan kamar untuk narapidana . Daya tampung lapas maupun sarana dan prasarana yang ada semestinya di sesuaikan dengan angka kriminal suatu kota besar , hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana yang sesuai dengan keadaan statistik narapidana yang ada. Penyesuaian lapas dan sarana yang ada di lapas seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencapai terwujudnya segala hak narapidana.
- c. Faktor narapidana yang kurang disiplin berdampak pada kesehatan narapidana , narapidana yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan selama berada di dalam lembaga pemasayarakatan dapat menyebabkan teman sekamar yang berada di dekatnya ikut terjangkit penyakit seperti penyakit kulit dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Hak Kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, maka Penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik. Saran – saran yang dikemukakan Penulis, adalah :

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hak-hak apa saja yang berjalan maupun tidak sehingga hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terabaikan terlebih lagi hak yang di gunakan narapidana setiap saat. Adanya pengawasan terhadap kinerja suatu lembaga pemasyarakatan juga merupakan hal yang penting untuk di perhatikan agar hak tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru seharusnya menambah jumlah tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan optimal , sarana prasarana yang dibutuhkan seperti gedung kamar tambahan dan lain sebagainya perlu di perhatikan agar hak narapidana mengenai kesehatan tidak terabaikan karena terdapat sarana dan prasarana memadai . untuk setiap hal yang merupakan hak narapidana sebaiknya di sampaikan ketika narapidana memulai memasuki lembaga pemasyarakatan sehingga narapidana mengetahui apa saja yang menjadi hak nya selama berada di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Hendarto, 2020, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, (Kalimantan Barat : IDE Publishing.
- Adami, Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adnan buyung ansution, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, jakarta : yayasan obor indonesia.
- Aggreini Kresnadari “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*” Vol.6 No.2, february 2018.
- Aim Abdulkarim. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Bisri, Ilham. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi Masyhur. 2010. *Hak Asasi Manusia*. Malang: Ghalia Indonesia.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hamja, 2019, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: budi utama.
- <http://www.putraprabu.wordpress.com>.
- <https://docplayer.info/47735371-Lembaga-pemasyarakatan-klas-ii-a-pekanbaru-lapas>.
- Indriati, Maria Farida. 2007. *ilmu perundang undangan*. Depok: kanisius.
- Joenadi Efendi, Ismu Gunawan, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>.
- Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara

Lariva Evazalia ”*Pemenuhan Kah Khusus Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pekanbaru*”, Volume 2 ,Nomor 2,10 Oktober 2015.

La Ode Husen,2009, *Negara Hukum Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Makasar : SIGn.

Lisa Angrayni, 2016, *HUKUM & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Kalimedia.

Muhammad Asri,2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi Teori & Instrumen Dasar*, Makasar : Sign.

Notoatmodjo.2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Pitri Wili Ramadani ,”*Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*” Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Ramokoy,Donald albert. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rocky Marbun , 2010, *Cerdik Dan Teknis Meghadapi Kasus Hukum* , Jakarta : Trans Media Pustaka.

Soekanto,Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatifve Suatu Tunjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugono,Bambang. 2003.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tina Asmarawati, 2014, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*,Yogyakarta : Deepublish.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

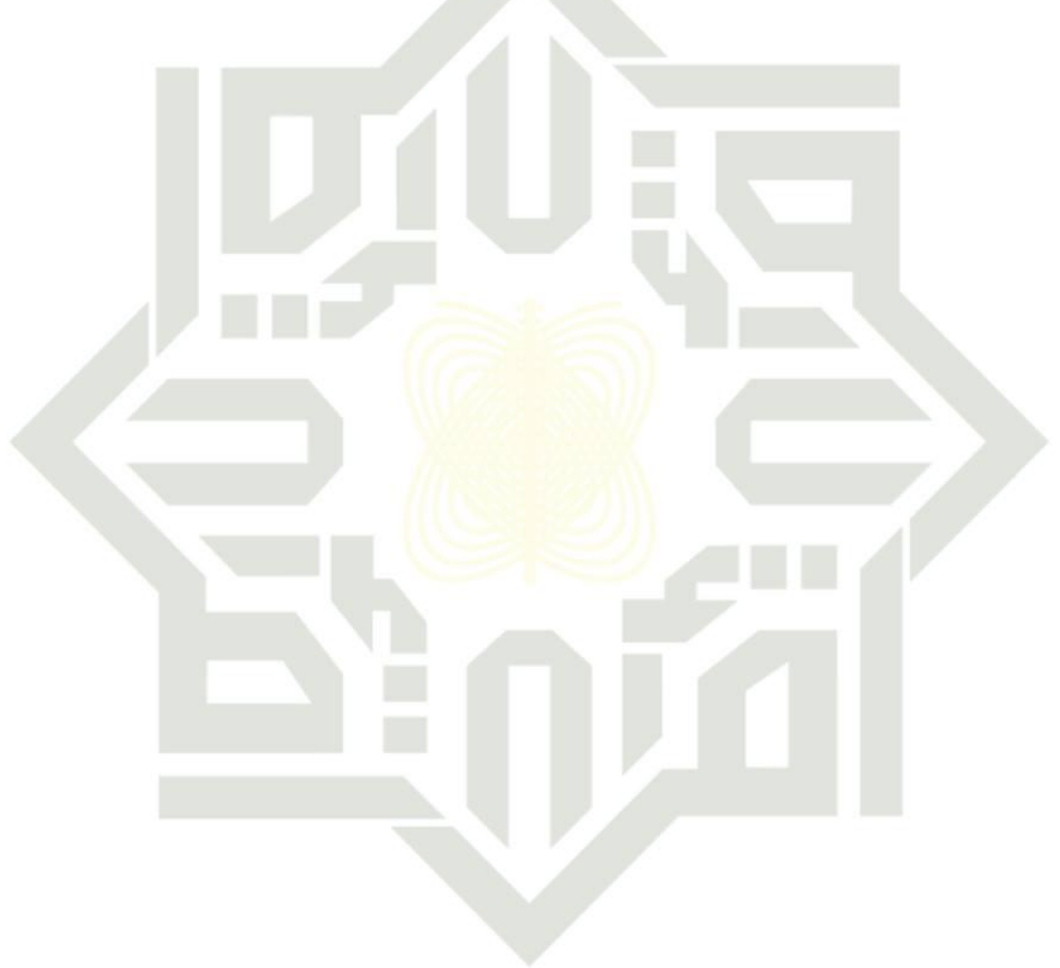
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Waluyo,Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk kasusbi binkemaswat :

1. Ada berapakah jumlah tenaga medis yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA pekanbaru ?
2. Apakah jumlah penguni lembaga pemasyarakatan termasuk melebihi kapasitas ?
3. Apakah ada pemeriksaan rutin massal setiap bulan bagi narapidana ?

Pertanyaan untuk tenaga medis :

1. Apakah jumlah tenaga medis sebanding dengan jumlah narapidana yang dirawat setiap harinya?
2. Bagaimana sistem pelayanan pasien yang ada di lembaga pemasyarakatan ?
3. Apakah untuk narapidana yang hamil mendapat pengkhususan ruangan dengan narapidana lainnya ?
4. Apakah ada pemberian vitamin dan suplemen bagi narapidana yang hamil dan menyusui ?
5. Apakah ada penambahan makanan bagi narapidana yang berpuasa ?

Pertanyaan untuk petugas masak di lembaga pemasyarakatan

1. Apakah pernah mendapatkan pelatihan dalam pengolahan pangan selama menjadi juru masak di lembaga pemasyarakatan ?
2. Apakah menu yang ada sudah sesuai dengan daftar menu ?
3. Apakah ada penambahan menu makanan bagi narapidana yang sedang hamil dan menyusui ?

DAFTAR PENGISIAN ANGKET

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

B. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

C. Pertanyaan

1. Apakah alat medis dan obat-obatan pada klinik di lapas sudah lengkap menurut anda ?
 - a. Sudah lengkap untuk semua penyakit
 - b. cukup lengkap untuk semua penyakit
 - c. kurang lengkap dan masih ada yang tidak ada
 - d. sangat tidak lengkap dan banyak yang tidak ada
2. Apakah setiap bulan anda rutin di periksa oleh pegawai kesehatan lapas ?
 - a. rutin Setiap bulan
 - b. 2 bulan sekali
 - c. 3 bulan sekali
 - d. Tidak pernah
3. apakah anda mendapatkan peralatan mandi seperti sabun sampo sikat gigi dan lain sebagainya setiap bulan dari pegawai dan perawat secara gratis ?
 - a. Selalu rutin mendapatkan setiap bulan
 - b. Hanya Beberapa bulan sekali
 - c. Jarang dan hampir tidak pernah
 - d. Tidak pernah sama sekali dan membeli sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. bagaimana anda mendapatkan pembalut untuk setiap bulan nya ?
 - a. mendapatkan jatah dari pegawai dan perawat secara gratis setiap bulan
 - b. di berikan oleh keluarga setiap bulannya
 - c. membeli sendiri di koperasi
 - d. mengandalkan bantuan teman sekamar yang mempunyai pembalut
5. apakah anda mendapat makanan tambahan ketika berpuasa ?
 - a. ya mendapat tambahan
 - b. kadang kadang mendapat tambahan
 - c. sangat jarang mendapat tambahan
 - d. tidak pernah mendapat tambahan
6. apakah menu makanan yang diberikan lapas sudah sesuai dengan menu yan tertera ?
 - a. sudah sesuai
 - b. tidak sesuai dan jarang bertukar
 - c. tidak pernah bertukar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG NEGAR/DAERAH ditulis oleh
saudara :

Nama : NASRIL AKBAR LUBIS

NIM : 11627103842

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 16 Desember 2019

Narasumber : Nur Hidayat., S.H., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Narasumber

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Nur Hidayat, S.H., MH.
NIP. 130 217 038

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/436/2020
Sifat : Biasa
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru.16 Januari 2020

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :Nasril Akbar Lubis
NIM :11627103842
Jurusan :Ilmu Hukum S1
Semester :VIII (Delapan)
Lokasi :lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga
pemasyarakatan perempuan kelas IIA pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU
 Jl. Bindanak No 1, Telp 0761 – 8404803, email : lpเปอร์empuanpekanbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : W4.PAS.PAS20.KP.07.03-0955

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Desi Andriyani
 NIP : 197512111998032001
 Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Nasril Akbar Lubis
 No. Mahasiswa : 11627103842
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Suska Riau
 Judul Penulisan : Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi
 Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
 Pekanbaru

yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data penelitian/riset dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata I (S-1) sejak tanggal 17 Februari 2020 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juni 2020

Kepala,


Desi Andriyani
 NIP. 197512111998032001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29746
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/436/2020 Tanggal 16 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

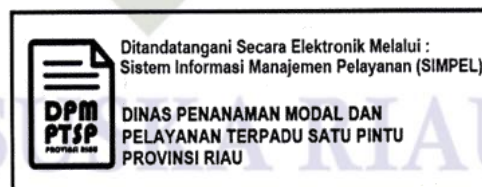
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NASRIL AKBAR LUBIS |
| 2. NIM / KTP | : | 11627103842 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satate Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NASRIL AKBAR LUBIS

NIM : 11627103842

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Pekanbaru*

Pembimbing : Lysa Angrayni, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Mr. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nasril Akbar Lubis, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 1997. Anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Mukhsin Lubis dan Eti Sumiati,. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 030 pekanbaru tamat pada tahun 2009.

Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 32 pekanbaru. tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke sekolah menengah atas (SMA) yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Selama masa perkuliahan penulis juga melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, pada bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Besurat Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2020 dan menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH) Di UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.